



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pembahasan Anggaran Perubahan Diperkirakan Molor

Terganjil pertanggungjawaban anggaran 2017 yang baru disetujui kemarin.

**Linda Hairani**

*linda.hairani@tempo.co.id*

**JAKARTA** — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memperkirakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 Perubahan bakal molor Sebab, Dewan belum menerima draft APBD Perubahan tersebut. Padahal rancangan plafon anggaran perubahan tersebut harus disepakati DPRD dan pemerintah DKI Jakarta paling lambat pekan kedua Agustus. "Itu masih harus dibahas bersama dan sampai sekarang kami belum terima draft," kata dia kemarin.

Prasetyo menjelaskan, keterlambatan pembahasan anggaran perubahan terjadi lantaran persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD 2017 sempat terhambat. Badan Anggaran DPRD mempertanyakan nilai sisa anggaran 2017 sebesar Rp 13,18 triliun. Menurut Badan Anggaran, nilai sisa anggaran tahun 2017 meningkat Rp 5,46 triliun dibanding sisa anggaran 2016.

Badan Anggaran baru menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD

2017 kemarin. Itu pun, kata Prasetyo, persetujuan diberikan dengan catatan. Pemerintah DKI harus menjelaskan rinci penyebab peningkatan sisa anggaran sebelum pembahasan APBD 2018 Perubahan dimulai. "Itu langgung jawab mereka untuk masyarakat," kata dia.

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan peningkatan sisa anggaran menunjukkan lemahnya perencanaan yang dibuat pemerintah. Ia juga meminta satuan kerja perangkat daerah memperbaiki sistem ulang. Sebab, lelang 2017 gagal lantaran vendornya tak ditemukan saat dinyatakan menang lelang. "Faktor itu harusnya dicek sejak awal," kata dia.

Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD Syarifuddin mempertanyakan peran inspektorat saat penyusunan anggaran. Menurut dia, inspektorat seharusnya memastikan tiap satuan kerja menyusun rencana kegiatan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memperkirakan rancangan APBD Perubahan bisa diserahkan kepada Dewan pada awal Agustus. "Sekarang

masih dibahas di internal," kata dia.

Saefullah mengapresiasi persetujuan yang diberikan Badan Anggaran atas laporan pertanggungjawaban APBD 2017. Menurut dia, persetujuan itu membuat sisa anggaran 2017 bisa didaftarkan dalam rancangan APBD 2018 Perubahan.

Saefullah menjelaskan, sisa anggaran tahun lalu akan digunakan untuk pembangunan rumah susun dalam program rumah murah atau rumah uang muka (DP) nol rupiah. Rumah murah tanpa uang muka itu antara lain akan dibangun di depo cibangun di depo ringan atau *light rail transit* (LRT) Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sana, PT Jakarta Propertindo akan membangun lima *tower* berisi 1.200 unit. Lokasi lainnya berada di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur.

Menurut Saefullah, penggunaan sisa anggaran juga bisa dialokasikan untuk penambahan subsidi pangan. Subsidi itu ditujukan untuk siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar. "Keputusan akhirnya bergantung pada pembahasan dengan Badan Anggaran," kata dia.

● LINDA HAIRANI

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN ITUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Pembahasan Anggaran Perubahan Diperkirakan Molor

## Tak Terserap atau Gagal Lelang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2017 tersisa Rp 13,16 triliun. Dari total itu, sekitar Rp 5 triliun berasal dari alokasi anggaran dinas teknis yang tak terserap pada tahun lalu. Sisanya berasal dari program yang gagal lelang serta alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Berikut ini rincian sisa anggaran dari dinas teknis dan program yang lolangnya gagal:

Instansi	Anggaran Perubahan 2017	Realisasi (Rp)
Dinas Bina Marga	2,73 miliar	2,13 miliar
Dinas Sumber Daya Air	1,71 triliun	1,00 triliun
Dinas Perumahan Rakyat	4,87 triliun	3,10 triliun
Dinas Cipta Karya	956,88 miliar	503,47 miliar
Dinas Kehutanan	993,82 miliar	871,30 miliar
Dinas Lingkungan Hidup	687,11 miliar	584,96 miliar
Biro Penataan Kota	856,23 juta	775,39 juta
<b>TOTAL</b>	<b>17,12 triliun</b>	<b>12,05 triliun</b>
<b>SISA 5,07 triliun</b>		

- Program I Harga Perkiraan Senciri (dalam rupiah)
- Pengadaan peralatan dan penercahayaan kota Suku Dinas Perindustrian Jakarta Barat 3,84 miliar
  - Pengadaan tower Suku Dinas Komunikasi Korpulian Seribu 2,17 miliar
  - Perawatan/docking kapal dinas Kabupaten Kepulauan Seribu 1,20 miliar
  - Jasa konsultasi masterplan tata air Dinas Sumber Daya Air 2,26 miliar
  - Pembangunan masjid asrama Pegadungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 5,15 miliar
  - Belanja bahan pangan rumah sakit umum daerah 8,32 miliar
  - Pembangunan jembatan di Jalan KH Abdullah Syahid, Jalan Puit Raya, Jalan Teluk Gong 2,62 miliar
  - Pengadaan alat ruang kamar perawatan dan alat ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo 1,30 miliar

SUMBER: BAKHTI HARNOJO, GURUBAKTI, DOTO KIKI, HARNOJO, UNDA HARNOJO